

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong instansi pemerintahan untuk melakukan transformasi digital dalam mendukung tata kelola administrasi dan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan. Pemanfaatan sistem informasi menjadi kebutuhan penting, khususnya dalam pengelolaan data, penyampaian informasi, serta pendukung pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Salah satu instansi yang membutuhkan dukungan sistem informasi yang terintegrasi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD(Suryadi & Wahyuni, 2023).

Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi persidangan, kegiatan kedewanan, dokumentasi hasil rapat, jadwal kegiatan, serta penyediaan informasi bagi pimpinan dan anggota dewan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan data dan informasi tersebut memerlukan sistem yang andal, terstruktur, dan mudah diakses. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan data secara terpusat, khususnya pada sisi backend sistem yang berfungsi sebagai pengolah, penyimpan, dan penyedia data bagi aplikasi yang digunakan. Ketidakterpaduan sistem backend dapat berdampak pada keterlambatan akses informasi, duplikasi data, serta kurang optimalnya efisiensi kerja(Putra et al., 2024).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban mengembangkan Sistem Informasi Dewan (SIWAN) sebagai sarana pendukung pengelolaan informasi kedewanan. Dalam pengembangan sistem tersebut, backend memiliki peran penting sebagai fondasi utama yang mengatur logika aplikasi, manajemen basis data, serta integrasi antar layanan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan backend yang terstruktur, aman, dan mampu mendukung kebutuhan aplikasi secara optimal.

Sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis praktik, Politeknik Negeri Jember melalui program magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam lingkungan kerja instansi pemerintahan.